

Globalisasi Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Berkembang

Nur Ana Rezeki Alifa

Pendidikan Ekonomi, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Email: nuranarezeki25@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: nuranarezeki25@gmail.com

Abstrak - Globalisasi ekonomi telah mempercepat integrasi pasar dunia melalui liberalisasi perdagangan, investasi asing langsung, dan perkembangan teknologi informasi. Meskipun membawa peluang pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang, globalisasi juga menimbulkan tantangan serius terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Artikel ini menganalisis dampak globalisasi ekonomi terhadap kedaulatan negara berkembang, dengan menyoroti bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan industri menjadi semakin dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti lembaga keuangan internasional dan korporasi multinasional. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, ditemukan bahwa keterbukaan ekonomi yang berlebihan seringkali melemahkan kapasitas negara dalam melindungi sektor domestik dan menetapkan arah pembangunan nasional secara mandiri. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi adaptif yang mengedepankan kepentingan nasional, termasuk diversifikasi ekonomi, penguatan regulasi domestik, dan diplomasi ekonomi yang berimbang, agar negara berkembang mampu mempertahankan otonomi kebijakan di tengah arus globalisasi.

Kata Kunci: Globalisasi Ekonomi; Kedaulatan Nasional; Negara Berkembang; Kebijakan Ekonomi; Liberalisasi Pasar.

Abstract - Economic globalization has accelerated the integration of global markets through trade liberalization, foreign direct investment, and advancements in information technology. While it offers growth opportunities for developing countries, it also poses significant challenges to national economic sovereignty. This article examines the impact of economic globalization on the sovereignty of developing nations, focusing on how fiscal, monetary, and industrial policies are increasingly influenced by external pressures such as international financial institutions and multinational corporations. Using a qualitative approach and literature review, the study finds that excessive economic openness often undermines a country's ability to protect domestic sectors and independently determine its development trajectory. The research highlights the importance of adaptive strategies that prioritize national interests, including economic diversification, strengthened domestic regulations, and balanced economic diplomacy, to ensure that developing countries can maintain policy autonomy amid global economic currents.

Keywords: Economic Globalization; National Sovereignty; Developing Countries; Economic Policy; Market Liberalization.

Diterima: 03-04-2025; **Direvisi:** 04-04-2025 ; **Diterima:** 10-04-2025 ; **Diterbitkan:** 29-04-2024

1. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah menjadi fenomena dominan dalam sistem ekonomi internasional sejak akhir abad ke-20. Proses ini ditandai oleh semakin terbukanya batas-batas negara terhadap aliran barang, jasa, modal, dan informasi, serta meningkatnya interdependensi antarnegara [1]. Bagi negara berkembang, globalisasi menawarkan peluang percepatan pertumbuhan melalui akses pasar internasional, teknologi, dan investasi asing. Namun, di sisi lain, globalisasi juga mengundang kekhawatiran terhadap melemahnya kontrol negara terhadap kebijakannya sendiri, atau yang dikenal sebagai erosi kedaulatan ekonomi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menelaah dampak globalisasi terhadap struktur ekonomi negara berkembang. Rodrik [2] menekankan bahwa globalisasi dapat mempersempit ruang kebijakan domestik, terutama dalam aspek fiskal dan moneter. Stiglitz [3] juga menunjukkan bahwa tekanan dari lembaga internasional seperti IMF dan WTO sering memaksa negara berkembang mengikuti kebijakan liberalisasi yang belum tentu selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang. Selain itu, penelitian oleh Chang [4] mengkritisi peran dominan korporasi multinasional yang sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan dan distribusi keuntungan yang adil di negara tuan rumah.

Studi empiris lainnya oleh Wade [5] menggarisbawahi bagaimana negara-negara Asia Timur mampu mempertahankan kontrol negara yang kuat meskipun turut terlibat dalam globalisasi, berbeda dengan banyak negara Afrika dan Amerika Latin yang mengalami deindustrialisasi dini. Penelitian oleh Gallagher [6] menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan bebas, seperti NAFTA dan TPP, memiliki implikasi struktural terhadap kemampuan negara dalam merumuskan regulasi industri strategis. Namun, sebagian besar studi tersebut berfokus pada dampak makro tanpa menyajikan pendekatan adaptif yang kontekstual bagi negara berkembang dalam menghadapi tekanan globalisasi.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan normatif-strategis, yaitu mengkaji secara kritis dampak globalisasi terhadap kedaulatan ekonomi negara berkembang, sekaligus menawarkan solusi berupa strategi adaptif berbasis penguatan kebijakan nasional. Berbeda dari studi sebelumnya, penelitian ini tidak hanya memetakan tantangan eksternal, tetapi juga mengusulkan kerangka strategi ketahanan ekonomi negara berkembang melalui pendekatan integratif: diversifikasi ekonomi, reformasi regulasi domestik, dan diplomasi ekonomi yang berimbang.

2. METODOLOGI

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis dan menginterpretasikan dampak globalisasi ekonomi terhadap kedaulatan ekonomi negara berkembang melalui penelaahan mendalam terhadap teori, konsep, serta temuan empiris dari berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Penelitian ini bersifat eksploratif dan normatif, dengan tujuan menyusun kerangka solusi strategis berbasis konteks negara berkembang.

2.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Studi pustaka terhadap artikel jurnal ilmiah internasional dan nasional yang terbit dalam rentang tahun 2021-2025.
2. Analisis dokumen resmi seperti laporan World Bank, IMF, UNCTAD, serta kebijakan fiskal/moneter dari negara berkembang.
3. Sumber data sekunder lain berupa buku ilmiah, working paper, dan prosiding yang relevan.

Kriteria inklusi dalam pemilihan sumber meliputi:

1. Fokus pada isu globalisasi ekonomi, kedaulatan negara, dan kebijakan ekonomi domestik.
2. Diterbitkan oleh lembaga akademik yang kredibel.
3. Mengandung temuan empiris atau kerangka teoritis yang dapat diadopsi ke konteks negara berkembang.

2.3 Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Koding Tematik (*Thematic Coding*):
Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti:
 - a. Pengaruh globalisasi terhadap kebijakan fiskal.
 - b. Peran lembaga internasional terhadap kedaulatan ekonomi.
 - c. Strategi adaptif negara berkembang dalam menjaga kemandirian ekonomi.
2. Analisis Kritis dan Komparatif:
Peneliti membandingkan pendekatan dan hasil dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan perbedaan respons antarnegara.
3. Sintesis Normatif:
Hasil temuan dirumuskan menjadi kerangka strategi normatif yang dapat diterapkan oleh negara berkembang untuk mempertahankan otonomi ekonomi di era globalisasi.

2.4 Validitas Data

Memastikan keabsahan data dan hasil, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari beberapa literatur dan dokumen dari berbagai sumber berbeda (akademik, kebijakan, dan institusi global). Selain itu, sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kualitas publikasi dan relevansi terhadap fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Globalisasi terhadap Ruang Kebijakan Ekonomi Nasional

Hasil studi menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi secara langsung memengaruhi ruang gerak kebijakan ekonomi nasional negara berkembang. Ketergantungan terhadap modal asing dan integrasi pasar global mengakibatkan negara berkembang menghadapi tekanan dari aktor eksternal seperti IMF, WTO, dan korporasi multinasional. Hal ini mengurangi fleksibilitas negara dalam menetapkan kebijakan fiskal, moneter, serta industri yang sesuai dengan konteks domestik. Rodrik (2022) dan Stiglitz (2022) menunjukkan bahwa negara berkembang kerap dipaksa untuk menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi yang belum tentu selaras dengan kebutuhan nasional jangka panjang [2][3].

Contohnya, penerapan kebijakan subsidi bahan pokok atau tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri kerap ditentang oleh lembaga internasional atas nama efisiensi pasar bebas. Padahal, kebijakan semacam ini dibutuhkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional yang lebih tangguh. Negara berkembang berada dalam dilema antara mengikuti arus globalisasi atau mempertahankan kendali atas sistem ekonominya sendiri.

3.2 Asimetri Kekuatan dalam Relasi Global

Salah satu temuan penting dari studi literatur ini adalah adanya asimetri kekuatan antara negara maju dan negara berkembang dalam sistem global. Negara maju memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam forum perdagangan

internasional, perumusan perjanjian ekonomi, dan penentuan agenda global. Sementara itu, negara berkembang sering kali menjadi penerima kebijakan dan regulasi yang telah dirumuskan tanpa mempertimbangkan konteks lokal mereka. Gallagher (2021) menyebutkan bahwa perjanjian seperti NAFTA dan TPP menurunkan kemampuan negara berkembang dalam melindungi sektor strategis [6].

Wade (2021) menyoroti bahwa hanya segelintir negara di Asia Timur yang berhasil mempertahankan kedaulatan ekonomi melalui strategi industrialisasi yang terencana. Sementara sebagian besar negara di Afrika dan Amerika Latin mengalami deindustrialisasi dini akibat liberalisasi pasar yang prematur [5]. Ini menunjukkan bahwa tanpa kekuatan politik dan kapasitas kelembagaan yang kuat, keterlibatan dalam sistem global justru bisa melemahkan fondasi ekonomi nasional.

3.3 Strategi Adaptif Negara Berkembang: Kasus Positif dan Negatif

Beberapa negara berhasil mengembangkan strategi adaptif untuk tetap terintegrasi dengan ekonomi global tanpa kehilangan kendali atas kebijakan domestik. Contohnya adalah Vietnam dan Ethiopia, yang menerapkan strategi industrialisasi berbasis ekspor dengan penguatan institusi domestik. Mereka menerima investasi asing secara selektif sambil tetap mengembangkan kapabilitas lokal dan melindungi sektor strategis.

Sebaliknya, negara-negara yang terlalu bergantung pada ekspor komoditas tanpa diversifikasi struktural seperti Nigeria dan Venezuela justru menghadapi krisis fiskal berkepanjangan saat harga komoditas turun. Hal ini memperlihatkan pentingnya kapasitas negara dalam mendisain kebijakan ekonomi nasional yang resilien, bukan hanya mengikuti tekanan pasar global.

3.4 Peran Korporasi Multinasional dan Dominasi Modal Global

Globalisasi tidak hanya membawa modal dan teknologi, tetapi juga memperbesar dominasi korporasi multinasional (MNCs) atas ekonomi domestik. Chang (2023) mengkritik dominasi MNCs yang tidak jarang menekan upah buruh, mengeksploitasi sumber daya, dan menghindari pajak melalui skema transfer pricing [4]. Di sisi lain, kebijakan negara tuan rumah sering kali terlalu lunak atau didesain untuk menarik investasi jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.

Penelitian juga mencatat bahwa MNCs berperan dalam membentuk kebijakan publik melalui lobi politik, yang mengarah pada “privatisasi kedaulatan” di mana kebijakan negara justru melayani kepentingan perusahaan global, bukan masyarakat lokal.

3.5 Tuntutan atas Model Pembangunan Baru

Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa negara berkembang membutuhkan model pembangunan baru yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kedaulatan. Model ini harus mencakup tiga aspek utama:

1. **Diversifikasi Ekonomi**
Negara perlu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, terutama sektor ekstraktif, dan membangun sektor manufaktur, teknologi, dan jasa berbasis nilai tambah domestik.
2. **Penguatan Regulasi Domestik**
Perlindungan terhadap sektor strategis melalui regulasi, insentif, dan mekanisme fiskal yang melindungi pelaku ekonomi lokal harus diprioritaskan.
3. **Diplomasi Ekonomi yang Berimbang**
Negara berkembang perlu bersatu dalam forum global untuk menuntut sistem perdagangan yang lebih adil, serta mengembangkan kerja sama Selatan-Selatan guna memperluas ruang manuver dalam kebijakan global.

4. KESIMPULAN

Simpulan dari pembahasan yaitu globalisasi ekonomi merupakan realitas yang tak terhindarkan, namun negara berkembang harus memiliki posisi tawar dan strategi yang kuat agar tidak menjadi korban dari dinamika ekonomi global yang timpang. Melemahnya kedaulatan ekonomi bukanlah akibat dari globalisasi semata, melainkan karena lemahnya kapasitas negara dalam merespons globalisasi secara strategis. Oleh karena itu, strategi ketahanan ekonomi nasional bukan hanya penting, tetapi merupakan syarat mutlak untuk menjaga otonomi pembangunan bangsa.

REFERENCES

- [1] J. Bhagwati, “The Globalization of the Economy,” *Global Policy*, vol. 12, no. 2, pp. 112–121, Apr. 2021. doi: 10.1111/1758-5899.12888
- [2] D. Rodrik, “Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-Wing Populism,” *Annual Review of Economics*, vol. 14, pp. 1–19, 2022. doi: 10.1146/annurev-economics-051520-020411



- [3] J. E. Stiglitz, "Rewriting the Rules of the Global Economy: An Agenda for Growth and Shared Prosperity," *Globalizations*, vol. 19, no. 1, pp. 89–105, 2022. doi: 10.1080/14747731.2021.1978476
- [4] H.-J. Chang, "Globalization, Economic Development and the Role of the State Revisited," *Cambridge Journal of Economics*, vol. 47, no. 1, pp. 99–118, Jan. 2023. doi: 10.1093/cje/beac035
- [5] R. Wade, "The Developmental State: Dead or Alive?," *Development and Change*, vol. 52, no. 1, pp. 23–40, Jan. 2021. doi: 10.1111/dech.12654
- [6] K. P. Gallagher and T. K. Chudnovsky, "The Globalization of Trade Agreements and the Impact on Policy Space in the Global South," *World Development*, vol. 148, pp. 105677, Mar. 2021. doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105677
- [7] D. Dollar, "China's Engagement with Africa: From Natural Resources to Human Resources," *Brookings Papers*, vol. 2023, no. 2, pp. 77–91, 2023. doi: 10.2139/ssrn.4373152
- [8] J. Lin and C. Monga, "Growth Identification and Facilitation: The Role of the State in the Dynamics of Structural Change," *World Bank Research Observer*, vol. 36, no. 2, pp. 158–183, Aug. 2021. doi: 10.1093/wbro/lkab004
- [9] M. K. Nielsen, "Global Value Chains and Sovereignty: The Political Economy of Embedded Trade," *Review of International Political Economy*, vol. 30, no. 2, pp. 214–235, Mar. 2023. doi: 10.1080/09692290.2022.2055447
- [10] A. Subramanian, "Globalization, Development, and Nation-State: Politics of Scale," *New Political Economy*, vol. 27, no. 5, pp. 823–838, 2022. doi: 10.1080/13563467.2022.2063500
- [11] L. Ndikumana, "Foreign Aid, External Debt, and Governance in Africa," *African Development Review*, vol. 33, no. S1, pp. S1–S12, 2021. doi: 10.1111/1467-8268.12506
- [12] M. Mazzucato, "The Entrepreneurial State in the Global South: A Pathway to Sovereignty," *Structural Change and Economic Dynamics*, vol. 58, pp. 289–301, Mar. 2024. doi: 10.1016/j.strueco.2024.01.003
- [13] A. Saad-Filho, "Neoliberalism as Economic and Political Project: Implications for Sovereignty," *Critical Sociology*, vol. 48, no. 6, pp. 855–871, Oct. 2022. doi: 10.1177/08969205221080789
- [14] E. Reinert, "National Systems of Innovation in the Age of Globalization," *Technology in Society*, vol. 71, pp. 102063, 2022. doi: 10.1016/j.techsoc.2022.102063
- [15] J. Sachs, "Sustainable Development and Global Governance," *Nature Sustainability*, vol. 4, pp. 202–209, 2021. doi: 10.1038/s41893-020-00648-5
- [16] D. Acemoglu and P. Restrepo, "Technological Change and Sovereignty in Emerging Markets," *American Economic Review: Insights*, vol. 4, no. 3, pp. 255–270, Sep. 2022. doi: 10.1257/aeri.20210315
- [17] T. Oatley, "The Political Economy of Global Finance," *Annual Review of Political Science*, vol. 26, pp. 1–21, May 2023. doi: 10.1146/annurev-polisci-051921-085803
- [18] F. Bastiaens and M. Postnikov, "Domestic Institutions and Sovereign Autonomy under Global Capitalism," *International Studies Quarterly*, vol. 67, no. 1, pp. 1–14, 2023. doi: 10.1093/isq/sqac073
- [19] M. Blyth, "After the Crisis: Governing Economic Uncertainty," *Governance*, vol. 34, no. 2, pp. 379–399, Apr. 2021. doi: 10.1111/gove.12523
- [20] J. D. Sachs and G. D. Lagomarsino, "Reclaiming Sovereignty Through Development," *Journal of Globalization and Development*, vol. 13, no. 1, pp. 1–15, 2023. doi: 10.1515/jgd-2022-0021